



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS ANDALAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HEFRIZAL HANDRA**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR II**
3. NHK : **750606**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.352.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 419 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/70 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/120 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
4. Tanah Seluas 324 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 1.717 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 287.000.000**

1. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



4. MOTOR, YAMAHA BBP-L A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	384.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	700.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	937.961.114
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.661.461.114

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.661.461.114

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.